

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif *National Interest*

Grace Frestisa Irena Hutabarat^{1*}

¹Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong, Jl. Malaweke, Aimas, Papua Barat. 98414

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: gracefih26@gmail.com

Abstract

The Russo-Ukrainian war in 2022, became the world's spotlight due to its negative impact on various sectors such as global trade. One of the countries affected is Indonesia, so based on its national interests. Indonesia provides a foreign policy related to the conflict. Therefore, this study examines the existence of Indonesia's foreign policy which is based on the principles of Indonesia's foreign policy with the principles of being free and active in the Russo-Ukrainian war. In its preparation, this research uses qualitative approach through descriptive methods and data collection techniques literature study. Where the period of this research is limited to the range of 2021 and 2022, according to the expansion of the conflict begins. The results of the study state that Indonesia as a country that adheres to the principle of being free and active, implements a free and active policy in global problems so that Indonesia is free to determine its attitude and does not bind itself to certain forces. This means that Indonesia is not siding with Russia or Ukraine. Support Indonesia significantly through various efforts to minimize negative impacts such as a decline in export-import, inflation, food crises and global security threats through efforts to approach with a personal soft power approach with a mission of peace. It aims to recommend new solutions and breakthroughs and offer to be a mediator in seeking peace.

Keywords: *Indonesia, Foreign Policy, National Interest Rusia-Ukraina*

Abstrak

Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022, menjadi sorotan dunia akibat dampak negatifnya yang mempengaruhi berbagai sektor seperti perdagangan global. Salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia, dengan demikian berdasarkan kepentingan nasionalnya, Indonesia memberikan kebijakan luar negeri terkait konflik tersebut. Maka dari itu penelitian ini mengkaji bagaimana eksistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang didasari oleh politik luar negeri Indonesia dengan menganut prinsip bebas aktif dalam perang Rusia-Ukraina. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dimana periode penelitian ini dibatasi pada kisaran tahun 2021 dan 2022, sesuai dengan perluasan konflik dimulai. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif menerapkan kebijakan bebas aktif dalam permasalahan global sehingga Indonesia bebas menentukan sikap dan tidak mengikat diri pada kekuatan tertentu. Artinya, Indonesia tidak memihak Rusia atau Ukraina. Mendukung Indonesia secara signifikan melalui berbagai upaya meminimalkan dampak negatif seperti penurunan ekspor-impor, inflasi, krisis pangan dan ancaman keamanan global melalui upaya pendekatan dengan pendekatan personal soft power dengan misi perdamaian. Ini bertujuan untuk merekomendasikan solusi dan terobosan baru dan menawarkan untuk menjadi mediator dalam mencari perdamaian.

Kata Kunci: *Indonesia, kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, Rusia-Ukraina*

PENDAHULUAN

Rusia resmi melakukan invasi terhadap Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022. Hal ini dipicu oleh konflik internal kedua negara tersebut. Aksi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini resmi mengundang berbagai macam respon dan kecaman dari dunia Internasional. Salah satu negara yang mengecam aksi Rusia adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut isu kemanusiaan di organisasi internasional. Selain itu juga konsep politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif sangat memudahkan keterlibatannya. Politik Luar Negeri Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999).

Politik Luar Negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konflik Rusia-Ukraina dampak negatif yang ditimbulkan sangat signifikan yakni terganggunya sector perdagangan internasional, inflasi, hingga krisis pangan dan ancaman pada keamanan global. Sehingga Indonesia memutuskan untuk mencari solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif membuat Indonesia sangat netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Namun dalam konflik ini eksistensi bebas aktif akan digoncangkan karena Indonesia memiliki nilai historis dengan kedua negara yang berkonflik tersebut. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan ancaman terbesar dalam stabilitas keamanan dan pertahanan yang sangat multidimensional terutama pada aspek perekonomian global karena Rusia memiliki cadangan pasokan minyak dunia terbesar.

Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampaknya dimana ekspor nonmigas Indonesia mengalami penurunan dan impor gandum ke Indonesia juga mengalami hambatan sehingga terjadi kenaikan harga bahan pangan (Permana, 2022). Sebenarnya porsi perdagangan antara Indonesia dengan Rusia dan Ukraina tidaklah besar namun konflik yang terjadi menjadi stimulus, ditambah komoditas perdagangan kedua negara tersebut merupakan komoditas yang cukup prospektif seperti gandum, pupuk, gas, dan minyak mentah (CPO) serta turunannya.

Dari berbagai dampak tersebut, memaksa Indonesia untuk memperlihatkan sikapnya terhadap konflik Rusia dan Ukraina karena efek yang ditimbulkan sangat mempengaruhi berbagai sistem di Indonesia. Selain itu juga, eksistensi politik luar negeri yang bebas aktif mengalami kegoncangan akibat adanya nilai historis dari kedua negara terhadap Indonesia (Falahi, 2022), presiden Indonesia yakni Joko Widodo sebagai ketua G20 menyerukan kepada Rusia selaku anggota G20 untuk penghentian perang atas Ukraina karena berdasarkan isu-isu kemanusiaan dan Presiden Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada siapapun dan berusaha untuk tetap menjaga netralitas berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun jika penulis meninjau dari sisi kepentingan nasional Indonesia, dapat diprediksikan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif ini akan mengalami kebingungan akibat nilai historis antara Indonesia dan Rusia.

Selain itu juga, *statement* terakhir menteri keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa seluruh undangan peserta G20 di Bali telah disebarkan termasuk Pemerintah Rusia dan Presiden Rusia berkeinginan menghadiri acara tersebut namun keputusan Indonesia sebagai pimpinan G20 tersebut menuai banyak tekanan dari pihak barat dan NATO bahkan Joe Biden mengatakan akan memboikot *event* tersebut jika Presiden Vladimir Putin hadir.

Maka atas dasar itulah penulis ingin menguji bagaimana eksistensi prinsip bebas aktif yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam kebijakan luar negerinya terhadap konflik

Rusia-Ukraina yang berdampak global. Sebagaimana prinsip ini telah diimplementasikan pada konflik rohingya di Myanmar, dimana dengan prinsip bebas aktifnya Indonesia berusaha menyelesaikan permasalahan di kawasan ASEAN serta juga berusaha membangun pendekatan secara personalitas melalui metode *soft power* untuk mendorong adanya negosiasi dari kedua belah pihak (Triwahyuni et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan teori politik luar negeri dan teori kepentingan nasional dengan konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Konsep politik luar negeri Indonesia diatur dalam pasal 2 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri Indonesia. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut asas bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Konsep ini menjadikan politik bebas aktif sebagai stimulus dalam mencapai kepentingan nasional karena prinsipnya yang tidak membelenggu suatu kekuatan sehingga Indonesia bebas menjalin hubungan dengan negara manapun tanpa terdoktrin oleh ideologi negara tersebut, sehingga membuka peluang untuk Indonesia dalam bebas bersikap dalam menanggapi permasalahan global (Ardyamarthinino & Ningsih, 2022).

Hal tersebut dikenal dengan politik luar negeri yang mana mencakup kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 1999). Kebijakan luar negeri merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kepentingan nasional yang dilakukan secara tertutup ataupun terbuka dalam perspektif kepentingan nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan berbagai data yang sesuai secara sistematis dalam memudahkan penulis untuk memberikan argumen. Berdasarkan pernyataan Miles dan Huberman analisis diklasifikasikan menjadi

tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Penulis memanfaatkan analisis data kualitatif yang bersifat induktif artinya melakukan kajian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini, berfungsi dalam membantu penulis untuk menelusuri laporan dan fakta, seperti buku literatur, jurnal penelitian, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, media massa, dan sumber data lainnya. Penulis juga memberikan batasan dalam menggunakan literatur terkait studi kasus yang dikaji, dalam rentang waktu 2021 hingga 2022 sebagaimana sesuai dengan perkembangan konflik Rusia-Ukraina terjadi hingga mengimplikasi pada dunia internasional.

PEMBAHASAN

Posisi Indonesia dalam Perang Rusia-Ukraina

Di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, Indonesia mendapatkan peluang untuk mempertunjukkan perannya selaku negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasionalnya. Menurut Winardi Hanafi Lucky bebas aktif dalam prinsip politik luar negeri Indonesia tidak hanya bersikap netral aktif, namun memberikan kontribusi, dalam bentuk nyata seperti dukungan moral, pemikiran, dan juga bantuan kemanusiaan.

Karena krisis yang terjadi sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Ukraina. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Vasyl Hamianin sebagai Duta Besar Ukraina untuk Indonesia dukungan moral dan bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan oleh negara Ukraina, karena keberlangsungan hidup masyarakat Ukraina menjadi terganggu dengan kehadiran konflik tersebut (DPR RI, 2022). Atas dasar itulah, Indonesia berusaha mengupayakan berbagai tindakan efektif dalam meredam konflik tetapi juga untuk merangsang perundingan perdamaian. Karena dengan terciptanya perdamaian perdagangan internasional dapat kembali beroperasi. Salah satunya melalui kunjungan presiden Indonesia ke Rusia dan Ukraina untuk bertemu presiden Putin dan Zelensky dimana kunjungan tersebut membawa misi untuk terdorongnya perdamaian

melalui dialog.

Hal ini dilatarbelakangi oleh dampak negatif dari konflik tersebut makin terasa. Terlebih pada aspek perdagangan internasional yang terhambat sehingga menimbulkan inflasi serta krisis pangan di berbagai negara, terlebih juga konflik ini menimbulkan kewaspadaan terhadap keamanan internasional akibat adanya berbagai ancaman penggunaan senjata nuklir. Dalam dialog ini, presiden Indonesia meminta untuk menurunkan penggunaan angkatan bersenjata dan jalur-jalur perdagangan dapat dibuka kembali. Dan kedua presiden tersebut menyetujui untuk bersama-sama membuka kembali jalur perdagangan yang sempat di blokade (Saptohutomo, 2022).

Maka dari itu, prinsip bebas aktif Indonesia ini sangat membantu, dalam memberikan kontribusi nyata terhadap Ukraina. Prinsip bebas aktif yang dianut oleh negara Indonesia sebagai politik luar negerinya tidak identik dengan sikap netral, akan tetapi bebas dalam bersikap berdasarkan kepentingan nasional. Sikap Indonesia juga bukan hanya mengikuti negara lain tetapi juga merumuskan upaya untuk mengaspirasikan pentingnya penghormatan tentang norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendesak untuk dihentikannya segala macam kekuatan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Solusi yang direkomendasikan Indonesia adalah deeskalasi (Djumala & Gatra, 2022).

Deeskalasi menjadi rekomendasi efektif untuk menstimulasi terjadinya perundingan yang dapat membuka peluang untuk jalur kemanusiaan (Kurmala, 2022), dalam konflik Rusia dan Ukraina, posisi Indonesia sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa tidak akan memihak pihak manapun dan akan tetap menjalin hubungan baik antara keduanya karena bagaimanapun juga kedua negara tersebut merupakan sahabat Indonesia. Di mana hal tersebut dilakukan dengan kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina dalam membawa misi perdamaian melalui pengaktifan kembali kerja sama ekonomi global.

Di sisi lain, Indonesia melihat bahwa konflik Rusia dan Ukraina adalah konflik yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, sikap Indonesia tidak boleh terlalu mengintervensi

konflik yang terjadi. Tindakan yang perlu dilakukan Indonesia cukup memberikan dukungan moral, bantuan kemanusiaan, dan konsep rekomendasi solusi. Selain itu juga, Indonesia perlu mendorong pembukaan zona pengungsi untuk menampung lebih banyak masyarakat sipil yang harus mengungsi akibat konflik.

Peran Indonesia yang lebih dominan juga dapat dilihat dalam posisinya sebagai presidensi forum G20. Indonesia sebagai tuan rumah, harus terus melindungi forum tersebut dari potensi pemanfaatan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Ukraina. Namun perlu diingat bahwa forum G20 merupakan organisasi finansial dan ekonomi sehingga konflik tersebut tidak seharusnya dimasukkan dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, karena perang ini sangat berdampak terhadap sektor perekonomian, Indonesia merasa perlu untuk melindungi forum G20.

Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Kepentingan Nasional

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yakni bebas aktif, kerap dibincangkan dalam isu penyikapan Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Sikap politik luar negeri yang tidak seharusnya hanya netral harus memberikan *impact* secara nyata dalam krisis dan berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara-bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan negara lain mempengaruhi suatu bangsa baik kebijakan yang mengarah ke positif atau negatif. Terkait kebijakan, kepentingan nasional dijadikan sebuah pusat dalam proses pengambilan keputusan.

Kepentingan nasional bersifat permanen, dimana mencakup geografi, sejarah, sumber daya (ekonomi), hubungan mitra, populasi dan etnis (Burchill, 2005). Jutta Weldes dalam perspektif konstruktivis memaparkan bahwa kepentingan nasional sangat penting bagi politik internasional. Dimana terklasifikasi menjadi dua bagian yaitu pertama, melalui konsep kepentingan nasional para pembuat kebijakan memahami tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian dalam praktiknya membentuk dasar untuk tindakan negara. Kedua, berfungsi sebagai perangkat retorik yang memberikan dukungan atas tindakan legitimasi dan politik sebuah negara. Sehingga menjadi penunjang

dalam melegitimasi tindakan yang diambil oleh negara.

Kepentingan nasional menjadi konsep dalam menggambarkan, menjelaskan, dan menilai kebijakan luar negeri bangsa-bangsa. Artinya kepentingan nasional menjadi alat penafsir dalam menganalisis strategi. Pola seperti ini akan membantu dalam menyokong tujuan-tujuan strategis para pengambil keputusan. Keputusan yang sudah ditetapkan akan dispesifikasikan ke dalam interpretasi pemikiran taktis. Ada dua komponen dalam menyusun strategi yakni komponen *ofensif* dan komponen *defense*. Komponen *ofensif* akan mendesain konsep dalam mencapai tujuan serta mengkalkulasikan keberhasilan dan kerugian yang bisa diraih dari sebuah kebijakan. Sedangkan komponen *defense* menjadi rencana dalam pencegahan terhadap negara lain jika kepentingan suatu negara terancam, serta menjadi sebuah rencana ketika pencegahan itu gagal (Sinaga, 2010).

Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina, mencoba menempatkan diri dalam zona aman dengan menggunakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya dengan memperhatikan komponen *ofensif* dan *defense*. Hal ini bertujuan agar kepentingan Indonesia tidak diganggu oleh

Di antaranya minyak hewani & nabati: ores, slag dan ashes; produk kertas, bubur kertas dan karton, peralatan elektrik dan elektronik, serta kimia organik. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, Indonesia melakukan penandatanganan MoU dengan Ukraina pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk mengadakan kerja sama peningkatan militer. Sedangkan aspek sosial dan budaya Ukraina mewarnainya dengan mengelaborasi budaya dan bahasa Indonesia ke dalam dunia pendidikan serta menerima batik dalam pameran internasional dan kebudayaan di Ukraina (Menteri Luar Negeri, 2014). Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia juga sudah terjalin dengan baik sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Hubungan diplomatik terjalin sejak Rusia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta bersama-sama dalam membuka kedutaan besar. Selain itu juga, dalam kasus pembebasan Irian Barat, Rusia menjadi negara yang memiliki peran besar dalam membantu Indonesia melawan Belanda. Rusia membantu Indonesia dengan menandatangani kontrak

pihak-pihak yang berkonflik. Sejak zaman orde baru prinsip ini telah diterapkan untuk membantu Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain secara fleksibel tanpa memperhatikan pemahaman yang dianut negara tersebut baik liberalisme, kapitalisme, dan komunisme.

Rusia dan Ukraina memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Hal ini telah diperlihatkan dengan berbagai kerjasama yang diprakarsai oleh Indonesia dengan kedua negara tersebut. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Ukraina terlihat dari berbagai aspek yaitu politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Pada aspek politik kerja sama antar kedua pihak terlihat pada tahun 2014 dimana terjadi penembakan pesawat terbang *Malaysian Airlines MH-17* di Grabove, wilayah Donetsk, pada 17 Juli 2014. KBRI dengan sigap membantu komunikasi dengan pemerintah secara intensif dan responsif dalam menyelesaikan musibah tersebut. Selain itu juga, Pemerintah Ukraina memutuskan untuk saling mendukung dengan Indonesia dalam pemilihan Dewan ITU tahun 2014-2018 (Menteri Luar Negeri, 2014).

Pada aspek ekonomi terlihat juga dengan kerja sama Ukraina mengimpor berbagai komoditas pengadaan peralatan militer berupa pesawat tempur, kapal selam, dan berbagai peralatan militer lainnya. Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo pun kemesraan antara Indonesia dan Rusia masih tetap terjalin dalam berbagai aspek. Dalam aspek politik, pertemuan bilateral antar kedua kepala pemerintahan sering diadakan. Misalnya pada sela-sela KTT APEC di Beijing pada tanggal 10 November 2014, Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin menyempatkan waktu untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas isu-isu bilateral, regional, dan internasional yang merupakan kepentingan bersama. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Rusia mengadakan *Indonesia Agriculture Investment Forum (IAIF)* pada tanggal 28 Oktober 2014 di Moskow. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Kepentingan Nasional.

Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yakni bebas aktif, kerap dibincangkan dalam isu penyikapan Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Sikap politik luar negeri yang tidak

seharusnya hanya netral harus memberikan impact secara nyata dalam krisis Ukraina karena pengaruh yang ditimbulkan sangat menyerang kelangsungan hidup negara Indonesia meskipun konflik yang terjadi tidak berada di kawasan ASEAN.

Politik luar negeri pada mulanya merupakan action theory atau kebijakan suatu negara yang diarahkan terhadap negara lain dalam mencapai kepentingan nasional. Kebijakan sikap Indonesia dalam menanggapi perang Rusia dan Ukraina haruslah mengingat tentang kepentingan nasional atau national interest. Hal ini dibenarkan oleh Frankel bahwa kepentingan nasional bersifat objektif dan berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara-bangsa. Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan negara lain mempengaruhi suatu bangsa baik kebijakan yang mengarah ke positif atau negatif. Terkait kebijakan, kepentingan nasional dijadikan sebuah pusat dalam proses pengambilan keputusan. Kepentingan nasional bersifat permanen, dimana mencakup geografi, sejarah, sumber daya (ekonomi), hubungan mitra, populasi dan etnis (Burchill, 2005), dalam perspektif konstruktivis memaparkan bahwa kepentingan nasional sangat penting bagi politik internasional. Dimana terklasifikasi menjadi dua bagian yaitu pertama, melalui konsep kepentingan nasional para pembuat kebijakan memahami tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan demikian dalam praktiknya membentuk dasar untuk tindakan negara. Kedua, berfungsi sebagai perangkat retorik yang memberikan dukungan atas tindakan legitimasi dan politik sebuah negara. Sehingga menjadi penunjang dalam melegitimasi tindakan yang diambil oleh negara.

Kepentingan nasional menjadi konsep dalam menggambarkan, menjelaskan, dan menilai kebijakan luar negeri bangsa-bangsa. Artinya kepentingan nasional menjadi alat penafsir dalam menganalisis strategi. Pola seperti ini akan membantu dalam menyokong tujuan-tujuan strategis para pengambil keputusan. Keputusan yang sudah ditetapkan akan dispesifikasikan ke dalam interpretasi pemikiran taktis.

Menurut Lovell ada dua komponen dalam menyusun strategi yakni komponen ofensif dan komponen *defense*. Komponen ofensif akan

mendesain konsep dalam mencapai tujuan serta mengkalkulasikan keberhasilan dan kerugian yang bisa diraih dari sebuah kebijakan. Sedangkan komponen *defense* menjadi rencana dalam pencegahan terhadap negara lain jika kepentingan suatu negara terancam, serta menjadi sebuah rencana ketika pencegahan itu gagal (Sinaga, 2010), Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina, mencoba menempatkan diri dalam zona aman dengan menggunakan prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya dengan memperhatikan komponen ofensif dan *defense*.

Hal ini bertujuan agar kepentingan Indonesia tidak diganggu oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sejak zaman orde baru prinsip ini telah diterapkan untuk membantu Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain secara fleksibel tanpa memperhatikan pemahaman yang dianut negara tersebut baik liberalisme, kapitalisme, dan komunisme. Rusia dan Ukraina memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Hal ini telah diperlihatkan dengan berbagai kerjasama yang diprakarsai oleh Indonesia dengan kedua negara tersebut. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Ukraina terlihat dari berbagai aspek yaitu politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan budaya. Pada aspek politik kerja sama antar kedua pihak terlihat pada tahun 2014 dimana terjadi penembakan pesawat terbang Malaysian Airlines MH-17 di Grabove, wilayah Donetsk, pada 17 Juli 2014. KBRI dengan sigap membantu komunikasi dengan pemerintah secara intensif dan responsif dalam menyelesaikan musibah tersebut. Selain itu juga, Pemerintah Ukraina memutuskan untuk saling mendukung dengan Indonesia dalam pemilihan Dewan ITU tahun 2014-2018 (Menteri Luar Negeri, 2014).

Pada aspek ekonomi terlihat juga dengan kerja sama Ukraina mengimpor berbagai komoditas di antaranya minyak hewani & nabati; ores, slag dan ashes; produk kertas, bubur kertas dan karton, peralatan elektrik dan elektronik, serta kimia organik. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, Indonesia melakukan penandatanganan MoU dengan Ukraina pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk mengadakan kerja sama peningkatan militer. Sedangkan aspek sosial dan budaya Ukraina mewarnainya dengan mengelaborasi budaya dan bahasa Indonesia ke dalam dunia pendidikan serta menerima

batik dalam pameran internasional dan kebudayaan di Ukraina (Menteri Luar Negeri, 2014).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia juga sudah terjalin dengan baik sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Hubungan diplomatik terjalin sejak Rusia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia serta bersama-sama dalam membuka kedutaan besar. Selain itu juga, dalam kasus pembebasan Irian Barat, Rusia menjadi negara yang memiliki peran besar dalam membantu Indonesia melawan Belanda. Rusia membantu Indonesia dengan menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer berupa pesawat tempur, kapal selam, dan berbagai peralatan militer lainnya.

Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo pun kemesraan antara Indonesia dan Rusia masih tetap terjalin dalam berbagai aspek. Dalam aspek politik, pertemuan bilateral antar kedua kepala pemerintahan sering diadakan. Misalnya pada sela-sela KTT APEC di Beijing pada tanggal 10 November 2014, Presiden Joko Widodo dan Presiden Vladimir Putin menyempatkan waktu untuk mengadakan pertemuan. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas isu-isu bilateral, regional, dan internasional yang merupakan kepentingan bersama. Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Rusia mengadakan Indonesia Agriculture Investment Forum (IAIF) pada tanggal 28 Oktober 2014 di Moskow.

Kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan investasi di bidang pertanian dan peternakan. Hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia juga terjalin dalam aspek sosial budaya dimana untuk mempromosikan kunjungan wisata, kedua negara mengadakan pameran internasional di Rusia dengan menghadirkan berbagai UKM, tours operators, *hoteliers*, Kementerian terkait dan *stake holders* lainnya. Dilihat dari sisi historis, Indonesia memiliki rekam jejak perjalanan panjang dengan Rusia. Dalam konflik Rusia-Ukraina yang semakin intens, Indonesia mencoba memosisikan dirinya untuk tidak berpihak kepada pihak manapun karena melindungi kepentingan nasionalnya. Terlebih kedua negara tersebut memiliki kerja sama bilateral yang baik sehingga strategi yang perlu dilakukan Indonesia adalah tetap kepada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Dampak Sikap Indonesia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Berdasarkan National Interest.

Dampak atas sikap Indonesia terhadap kebijakan luar negeri didasari oleh kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia diklasifikasikan menjadi empat bagian berdasarkan UUD 1945 yaitu *survival*, vital, major, dan peripheral. Dalam tingkat *survival*, Indonesia menjaga kelangsungan hidup di wilayah teritorialnya dari berbagai ancaman keamanan konvensional maupun non konvensional. Pada area vital, Indonesia memusatkan pada bagian sains dan teknologi dimana hal ini menjadi penyokong kehidupan sebuah negara (Balontia, 2021).

Di tingkat major, Indonesia berusaha menjaga stabilitas dan perdamaian dunia dengan menjalin kerja sama dengan negara lain serta membentuk aliansi-aliansi ekonomi. Pada tingkat terakhir yaitu peripheral, Indonesia menyebarkan nilai-nilai nasionalisme untuk mempertahankan eksistensi perdamaian dunia. Amanat UUD 1945 sudah sangat jelas menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem non blok dalam menyikapi permasalahan Internasional, tetapi selalu menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan (humanitarian), sehingga dalam permasalahan konflik internasional Indonesia tidak dapat mengirimkan bantuan pasukan ataupun persenjataan, melainkan Indonesia akan selalu mengirimkan bantuan kemanusiaan (Balontia, 2021).

Tetapi pada realita yang terjadi sejak masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia masih sering condong ke salah satu pihak, contohnya pada saat pemerintahan Ir. Soekarno Indonesia lebih dekat kepada pihak Soviet, karena di anggap akan lebih menguntungkan pemerintahan Indonesia. Apakah pada saat perang Rusia-Ukraina saat ini pemerintah Indonesia akan berpihak kepada Rusia? Mengingat pengaruh barat saat ini mulai melemah atas tindakan Rusia kepada Ukraina. Berdasarkan pidato menteri pertahanan Indonesia pada sidang PBB mengatakan bahwa Indonesia akan selalu berada pada sikap non blok dengan meminta pihak Rusia untuk segera mengakhiri perang terhadap Ukraina. Tetapi dalam pertemuan berbeda yang dihadiri delegasi-delegasi dari negara-negara G20 Indonesia telah mengirimkan undangan KTT di

Bali dan telah dikonfirmasi oleh pihak Rusia. Atas tindakan tersebut Indonesia mendapatkan tekanan-tekanan dari negara Barat untuk tidak mengundang presiden Rusia (Fadhillah, 2022), namun Indonesia tidak gentar terhadap somasi dari Amerika dan sekutunya, sebab Indonesia sadar betul terhadap kekuatan Rusia yang mampu menandingi negara-negara Barat dan bahkan sanksi yang telah diberikan kepada Rusia kini berbalik arah dengan sanksi yang diberikan Rusia kepada negara-negara NATO dengan menerapkan Rubel sebagai mata uang pembayaran migas dari Rusia. Disini terbukti bahwa Rusia mampu memberikan keseimbangan terhadap pengaruh negara-negara Barat yang selama ini mendominasi dunia. Untuk itu sikap tegas Indonesia dengan tidak memihak salah satu pihak dianggap tepat mengingat Indonesia merupakan negara strategis di Asia Tenggara (Sucipto, 2022).

Hal ini sangat merepresentasikan komponen *ofense* dan *defense* dalam membuat strategi dengan mengedepankan keoptimalan keuntungan. Di mana dampak yang ditimbulkan dari sikap Indonesia ini akan sangat positif dan menguntungkan Indonesia dari berbagai lini baik itu perekonomian, politik, pertahanan dan keamanan. Terbukti dengan stabilisasi ekonomi Indonesia di saat negara-negara barat mengalami inflasi besar-besaran, Indonesia tetap di hormati sebagai Pemimpin G20 dan ini menjadi langkah awal untuk Indonesia di bidang pertahanan setelah sebelumnya gagal menjalin diplomasi pertahanan dan keamanan dengan Rusia untuk pembelian SU-35.

Selain itu juga sikap Indonesia dinyatakan melalui kunjungannya ke Rusia dan Ukraina. Kunjungan tersebut bertujuan membawa misi perdamaian melalui operasionalisasi kegiatan perekonomian di kedua negara yakni ekspor terutama biji-bijian seperti gandum, pupuk, dan gas alam (detiknews, 2022), hal ini dilakukan agar menciptakan kestabilan terutama pada negara-negara berkembang maupun miskin dalam hal ini Indonesia, tetapi juga untuk merangsang terjadinya perdamaian.

Karena selain mewujudkan kerja sama ekspor, Indonesia juga menyatakan bahwa siap menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik kedua negara tersebut (Rachman & Arjanto, 2022). Di mana hal tersebut sangat mengimplementasikan konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang

berdasarkan Politik Luar Negerinya sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 (Kurmala, 2022).

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa eksistensi kebijakan luar negeri Indonesia melalui politik luar negeri Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 menyatakan bahwa Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif dalam membuat kebijakan luar negerinya. Hal ini bertujuan membantu Indonesia agar lebih leluasa dalam menyatakan sikap dan bertindak, dimana dengan prinsip ini membuat Indonesia tidak memihak kepada berbagai aktor yang berkonflik.

Dalam perang Rusia dan Ukraina memiliki berbagai dampak negatif yang mengancam segala sektor, khususnya ekonomi dalam hal perdagangan global. Seperti yang diketahui, kedua negara ini menjadi negara terbesar pemasok berbagai komoditas utama seperti gandum, pupuk, gas alam, dan minyak. Di mana komoditas-komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh konsumen internasional. Akibat blokade yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina menimbulkan berbagai macam komoditas tersebut tidak dapat didistribusikan sehingga kegiatan ekspor-impor menjadi terhambat.

Kelangkaan ini menimbulkan naiknya harga barang mencapai 30% dari harga normal yang membuat masyarakat kaum menengah hingga kaum miskin kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya. Salah satu negara terdampak dari perang Rusia dan Ukraina ini adalah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hubungan Luar negeri nomor 37 Tahun 1999 pasal 3 menyatakan "Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional". Sehingga landasan inilah yang digunakan Indonesiadalam menentukan kebijakannya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi perang Rusia dan Ukraina adalah mengupayakan deeskalasi konflik.

KESIMPULAN

Metode ini dapat merangsang adanya negosiasi perdamaian. Kemudian tak hanya itu, Presiden Indonesia melakukan kunjungan ke negara

Rusia dan Ukraina dengan membawa misi perdamaian melalui kestabilan komoditas ketahanan pangan. Selain itu juga Indonesia menawarkan diri dalam memoderatori mediasi yang diusung oleh berbagai negara global. Dan perlahan upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian mulai terlihat dimana misi perdamaian tersebut diterima dengan berbagai syarat. Indonesia juga mengupayakan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat Rusia dan Ukraina.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sangatlah merepresentasi prinsip yang dianut dalam politik luar negeri Indonesia tetapi juga mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga tindakan ini sangat berdampak pada Indonesia sebagai bargaining power dalam sektor ekonomi dan keamanan serta pertahanan.

Sikap ini mengimplikasikan pada keberadaan Indonesia sebagai presidensi forum G20 November mendatang. Karena perang Rusiadan Ukraina sangat berpengaruh pada sektor ekonomi dan politik yang dapat mengancam nilai-nilai G20. Perang antara Rusia-Ukraina juga berpotensi dalam menciptakan spillover yang dapat mengancam pemulihan ekonomi dan mengakibatkan koordinasi dan kerja sama menjadi komplikasi. Masalah geopolitik ini menjadi tantangan bersama dunia global khususnya negara anggota G20, karena forum G20 di Indonesia akan membahas agenda strategis pemulihan ekonomi bukan hanya untuk Indonesia tetapi bagi dunia terlebih pascaperang yang mana sektor ekonomi masih belum optimal. Maka dari itu upaya Indonesia sebagai presidensi G20 sangat positif dalam menjaga forum tersebut agar dapat menciptakan konsensus-konsensus yang bermanfaat.

Terlebih dengan sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, membuat sikap Indonesia lebih tegas dalam menyikapi persoalan global yang ditimbulkan oleh Rusia dan Ukraina. Dimana Indonesia dengan tegas menyatakan sikapnya kepada kedua negara tersebut untuk bertanggung jawab mengatasi krisis pangan yang diakibatkan oleh arus

perdagangan internasional yang terhambat serta juga meminta untuk dilakukannya penurunan penggunaan senjata, yang mana kebijakan ini dilakukan tanpa adanya tekanan dari kekuatan manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyamarthinino, V., & Ningsih, W. (2022, January 17). *Latar Belakang Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia* Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/17/120000679/latar-belakang-lahirnya-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia?page=all>.
- Balontia, M. (2021, December 8). *Memetakan Kepentingan Nasional Indonesia*. Binus University.
<https://binus.ac.id/bandung/2021/12/memetakan-kepentingan-nasional-indonesia/#:~:text=Garis%20besar%20kepentingan%20nasional%20indonesia,ikut%20melaksanakan%20ketertiban%20dunia%20>.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory* (1st ed.). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9780230005778>.
- Detiknews. (2022, July 23). *Ukraina Bisa Ekspor 20 Juta Ton Gandum Usai Perjanjian dengan Rusia*. DetikNews.
<https://news.detik.com/bbc-world/d-6195128/ukraina-bisa-ekspor-20-juta-ton-gandum-usai-perjanjian-dengan-rusia>.
- Djumala, D., & Gatra, S. (2022). *Prinsip Bebas-Aktif dalam Konflik Rusia-Ukraina*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/06200031/prinsip-bebas-aktif-dalam-konflik-rusia-ukraina>.
- DPR RI. (2022, April 11). *Terima Dubes Ukraina Komisi I Upayakan Solusi Damai*. DPR RI.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38571/t/Terima+Dubes+Ukraina%2C+Komisi+I+Upayakan+Solusi+Damai>.
- Fadhillah, M. (2022, April 7). *Sikap Indonesia Terkini pada Perang Rusia-Ukraina, Menlu Tegaskan Dorong Perdamaian*. Kompas.
<https://www.kompas.tv/article/277619/sikap-indonesia-terkini-pada-perang-rusia-ukraina-menlu-tegaskan-dorong-perdamaian>.

- Falahi, Z. (2022). KRISIS UKRAINA: TAWARAN RESOLUSI DAN DAMPAKNYA PEREKONOMIAN GLOBAL. *Info Singkat DPR*, 14(5), 13–18.
- Kurmala, A. (2022, February 24). *Ini Sikap Indonesia terhadap konflik Rusia- Ukraina ANTARA*.
<https://www.antaraneews.com/berita/2723745/ini-sikap-indonesia-terhadap-konflik-Rusia-Ukraina>.
- Menteri Luar Negeri. (2014). *Diplomasi Indonesia, 2014*. Permana, S. (2022). dampak perang rusia-ukrain terhadap perekonomian indonesia. *InfoSingkat DPR*, 14(5), 19–24.
- UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA, 1 (1999).
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.481>
- Rachman, F., & Arjanto, D. (2022, June 23). *Krisis pangan, 3 Negara Yang Paling Menderita Efek Perang Rusia Ukraina*. Tempo.Co.
<https://dunia.tempo.co/read/160584/krisis-pangan-3-negara-yang-paling-menderita-efek-perang-rusia-ukraina>.
- Saptohutomo, A. (2022, July 1). *Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/09242111/makna-di-balik-kunjungan-jokowi-ke-rusia-dan-ukraina>.
- Sinaga, O. (2010). *Implementasi Kebijakan Luar Negeri* (E. Sopandi, Heryadi Toni, & J. D. Iskandar, Eds.; 1st ed.). Lepsindo.
- Sucipto, T. (2022, July 3). *Misi Perdamaian Jokowi ke Rusia dan Ukraina Dinilai Sukses*. Med.Com.
<https://www.medcom.id/nasional/politik-ke-rusia-dan-ukraina-dinilai-sukses>.
- Triwahyuni, S. N., Wira Perdana, F., Setiawan, B., Irwan, I., & Wibisono, Y. (2021). Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2118–2125.